



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

STRATEGI PEMERINTAH MEMPERKUAT SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL

Muhammad Insan Firdaus
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketegangan geopolitik, perang dagang, dan tren proteksionisme yang mengancam stabilitas ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merancang sejumlah langkah strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menegaskan bahwa tantangan global ini berdampak langsung pada posisi fiskal Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menjaga ketahanan ekonomi sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.

Salah satu strategi yang diambil adalah memperkuat integrasi data lintas institusi. Kemenkeu menginisiasi program pertukaran data antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Bea dan Cukai, serta Anggaran, maupun dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan basis data yang lebih akurat dan transparan, sehingga kebijakan perpajakan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran. Anggito menjelaskan bahwa integrasi data menjadi fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan berbasis bukti, di mana setiap transaksi ekonomi dapat dipetakan dengan lebih baik.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan pengawasan transaksi digital, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Strategi ini menjadi krusial dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi digital yang membutuhkan instrumen pengawasan fiskal adaptif. Dengan memperketat pengawasan, diharapkan potensi penghindaran pajak dapat diminimalisir sekaligus memastikan kontribusi optimal dari sektor digital terhadap penerimaan negara.

Di sisi kebijakan tarif, pemerintah melakukan penyesuaian bea masuk dan perluasan cakupan cukai untuk mendukung berbagai tujuan strategis. Kebijakan ini tidak hanya dirancang untuk melindungi industri dalam negeri di tengah arus proteksionisme global, tetapi juga mendorong hilirisasi, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Misalnya, tarif bea masuk yang lebih selektif diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal, sementara perluasan cukai untuk barang-barang tertentu seperti plastik dan rokok sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan.

Optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam (SDA) juga menjadi prioritas utama. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha yang mengekstraksi SDA memberikan kontribusi fiskal yang adil bagi perekonomian nasional. Hal ini mencakup berbagai upaya, mulai dari revisi kebijakan royalti, pemberian insentif untuk hilirisasi, hingga pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa penerimaan negara dari sektor SDA benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan.

Untuk mendukung semua langkah tersebut, pemerintah terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang terintegrasi, seperti Coretax, *Custom Excise Information System and Automation* (CEISA), dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi,

kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi pengawasan. Dengan digitalisasi sistem, proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan minim penyalahgunaan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

Keberhasilan strategi-strategi ini tidak lepas dari kolaborasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam forum-forum internasional seperti 16th Asia Pacific Tax Forum yang digelar di Jakarta. Forum tersebut menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk berbagi praktik terbaik sekaligus menggalang kerja sama regional dalam menghadapi tantangan global. Pemerintah menyambut positif masukan dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan guna menghasilkan solusi yang aplikatif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan ini, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan fiskal tetapi juga memastikan bahwa sistem perpajakan nasional mampu mendorong keadilan sosial, inovasi industri, dan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk merespons dinamika global secara cerdas dan proaktif, dengan tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang bangsa.

Atensi DPR

Komisi XI DPR RI perlu mengambil peran aktif dalam mendorong penguatan sistem perpajakan nasional. *Pertama*, mempercepat pembahasan RUU yang mendukung integrasi data lintas instansi, termasuk penguatan payung hukum untuk pertukaran informasi antara Ditjen Pajak, Bea Cukai, dan kementerian terkait. *Kedua*, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap implementasi pengawasan transaksi digital untuk memastikan efektivitasnya dalam menanggulangi praktik penghindaran pajak. *Ketiga*, mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tarif bea masuk dan cukai, sambil memastikan penyesuaian tarif tetap memperhatikan daya saing industri dalam negeri. *Keempat*, memastikan adanya mekanisme pengawasan yang transparan terhadap kontribusi fiskal pelaku usaha di sektor ekstraktif. *Terakhir*, Komisi XI DPR RI juga harus memantau perkembangan sistem Coretax, CEISA, dan SIMBARA untuk memastikan integrasi sistem berjalan sesuai target. Melalui fungsi anggaran, Komisi XI DPR RI dapat mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk modernisasi sistem perpajakan ini.

Sumber

bisnis.com, 16 Juli 2025;
detik.com, 17 Juli 2025;
kemenkeu.go.id, 16 Juli 2025;
kontan.co.id, 17 Juli 2025; dan
metrotvnews.com, 17 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Fauzan Lazuardi R.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*